

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2020



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
Jl. Brawijaya Nomor 63 Jubung Telp. (0331) 487934 - 4226994 Fax (0331) 426994
Email : dpubmsda@jemberkab.go.id Website : bmsdajember.blogspot.com
JEMBER

KATA PENGANTAR

Dalam menyikapi perkembangan penyelenggaraan pelaksanaan pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan sebagaimana terjadinya perubahan-perubahan yang sangat substansi terutama berdasarkan TAP MPR Nomor XI/MPR/1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta tindak lanjut Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 menegaskan kembali tentang mewujudkan tekad penyelenggaraan pemerintah yang bersih, berdaya guna dan bertanggung jawab.

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember sebagai salah satu unsur perangkat pemerintah daerah Kabupaten Jember mengemban tugas dan tanggung jawab melaksanakan urusan rumah tangga di bidang pekerjaan umum, khususnya kebinamargaan, telah diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas tersebut. Pendelegasian wewenang atau amanat pada pejabat publik berikut berbagai sumberdaya yang digunakan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah Kabupaten Jember, harus diikuti dengan kewajiban menyampaikan pertanggung jawaban tertulis tentang apa yang sudah dilakukan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Dengan disusunnya LAKIP ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi, sehingga dapat meningkatkan Akuntabilitas, kinerja, kredibilitas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Jember pada tahun-tahun selanjutnya.

Jember, 25 Februari 2021

Pit. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA
MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN JEMBER



I.H. IMAM SUDARMAJI, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19690913 199501 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Gambaran Umum	1
1.2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Organisasi.....	2
1.2.1 Kedudukan.....	2
1.2.2 Tugas dan Fungsi.....	3
1.2.3 Susunan Organisasi.....	3
1.3 Permasalahan Utama / Isu Strategis	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
2.1 Rencana Strategik.....	11
2.2 Rencana Kinerja	13
2.3 Penetapan Kinerja	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	18
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	18
3.1.1 Membandingkan Antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2017.....	18
3.1.2 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Tahun Sebelumnya...	20
3.1.3 Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2017 dengan Target Jangka Menengah pada Dokumen Renstra	20
3.1.4 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Standar Nasional	22
3.1.5 Analisa penyebab keberhasilan / kegagalan, peningkatan / penurunan kinerja, dan alternatif solusi yang dilakukan	25
3.2 Realisasi Anggaran.....	25
BAB IV PENUTUP.....	29
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA	
FOTO DOKUMENTASI	



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum

Terselenggaranya Good Governance merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam pasal 3 undang-undang tersebut dinyatakan bahwa asas tertib penyelenggaraan Negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi melalui Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dengan didasarkan suatu perencanaan strategi yang ditetapkan.



Dengan dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah mengalami perubahan kedua kalinya hingga menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya terjadi perubahan yang sangat mendasar dalam pelaksanaan pemerintah yang memerlukan suatu antisipasi dengan kebijakan-kebijakan agar undang-undang tersebut berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga dalam pelaksanaannya Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember bertanggungjawab kepada Bupati melalui Laporan pertanggung jawaban yang menggambarkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

1.2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Organisasi

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember adalah organisasi yang menyusun LAKIP sebagai pertanggungjawaban kinerja mempunyai kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi sebagai berikut :

1.2.1 Kedudukan

Menurut Peraturan Bupati Jember Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember mempunyai kedudukan sebagai merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



1.2.2 Tugas dan Fungsi (Periode Januari – Oktober)

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang bina marga dan sumber daya air. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember :

1. perumusan kebijakan dalam penyusunan program penyelenggaraan infrastruktur jalan, jembatan, bangunan pelengkap jalan, dan pengembangan sumber daya air berupa jaringan irigasi dan bangunan pelengkap lainnya;
2. pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, bangunan pelengkap jalan, jaringan irigasi dan bangunan pelengkap lainnya, dan tangkis sungai;
3. pelaksanaan rehabilitasi dan pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, bangunan pelengkap jalan, jaringan irigasi dan bangunan pelengkap lainnya, dan tangkis sungai;
4. pembinaan, pembimbingan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyelenggaraan infrastruktur jalan, jembatan, bangunan pelengkap jalan, jaringan irigasi dan bangunan
5. pelengkap lainnya, dan tangkis sungai;
6. pengendalian, pengawasan, dan rekomendasi terhadap pemanfaatan ruang milik jalan dan sempadan sungai di luar fungsinya; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

1.2.3 Susunan Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan keluarnya Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati No. 37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,



Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember terdiri dari :

(1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Ka. Sub. Bag. Umum & Aset;
 2. Ka. Sub. Bag. Perencanaan dan Pelaporan; dan
 3. Ka. Sub. Bag. Keuangan.
- c. Kepala Bidang Perencanaan Teknis Infastruktur membawahi :
 1. Kepala Seksi Perencana Teknis jalan dan Rumija; dan
 2. Kepala Seksi Perencanaan Teknis Jembatan dan saluran Drenase
 3. Kepala Seksi Perencanaan Teknis Sumber Daya Air
- d. Kepala Bidang Teknis Jalan membawahi :
 1. Kepala Seksi Teknis Jalan Kabupaten dan Rumija; dan
 2. Kepala Seksi Teknis Jalan Desa
 3. . Kepala Seksi Unit Reasi Cepat Jalan dan Rumija
- e. Kepala Bidang Teknis Jembatan dan Drenase membawahi:
 1. Kepala Seksi Teknis Jembatan;
 2. Kepala Teknis Saluran drainase; dan
 3. Kepala Seksi Unit Reaksi Cepat Jembatan Saluran Drenase.
- f. Kepala Bidang Sumber Daya Air membawahi:
 1. Kepala seksi pembangunan dan rehabilitasi bendungan, waduk, dam, saluran irigasi;
 2. Kepala Seksi Operasi dan pemeliharaan irigasi Primer dan sekunder; dan
 3. Kepala seksi irigasi dan Tersier dan HIPPA.



h. Kepala Bidang Pendataan Pengendalian dan pendataan Aset Infrastruktur membawahi:

1. Kepala Seksi Aset Kebina Margaan; dan
2. Kepala Seksi Aset Sumber daya

i. Kepala Bidang Alat Berat dan Laboratorium

Kontruksi

1. Kepala Seksi Pemanfaatan Alat Berat
2. Kepala Seksi Bengkel Alat Berat
3. Kepala Seksi Laboratorium dan Kontruksi

- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.



1.2.2 Tugas dan Fungsi (Periode November – Desember)

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang bina marga dan sumber daya air. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember :

1. perumusan kebijakan dalam penyusunan program penyelenggaraan infrastruktur jalan, jembatan, bangunan pelengkap jalan, dan pengembangan sumber daya air berupa jaringan irigasi dan bangunan pelengkap lainnya;
2. pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, bangunan pelengkap jalan, jaringan irigasi dan bangunan pelengkap lainnya, dan tangkis sungai;
3. pelaksanaan rehabilitasi dan pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, bangunan pelengkap jalan, jaringan irigasi dan bangunan pelengkap lainnya, dan tangkis sungai;
4. pembinaan, pembimbingan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyelenggaraan infrastruktur jalan, jembatan, bangunan pelengkap jalan, jaringan irigasi dan bangunan pelengkap lainnya, dan tangkis sungai;
5. pengendalian, pengawasan, dan rekomendasi terhadap pemanfaatan ruang milik jalan dan sempadan sungai di luar fungsinya; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

1.2.3 Susunan Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan keluarnya Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati No. 37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,



Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember terdiri dari :

(1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas :

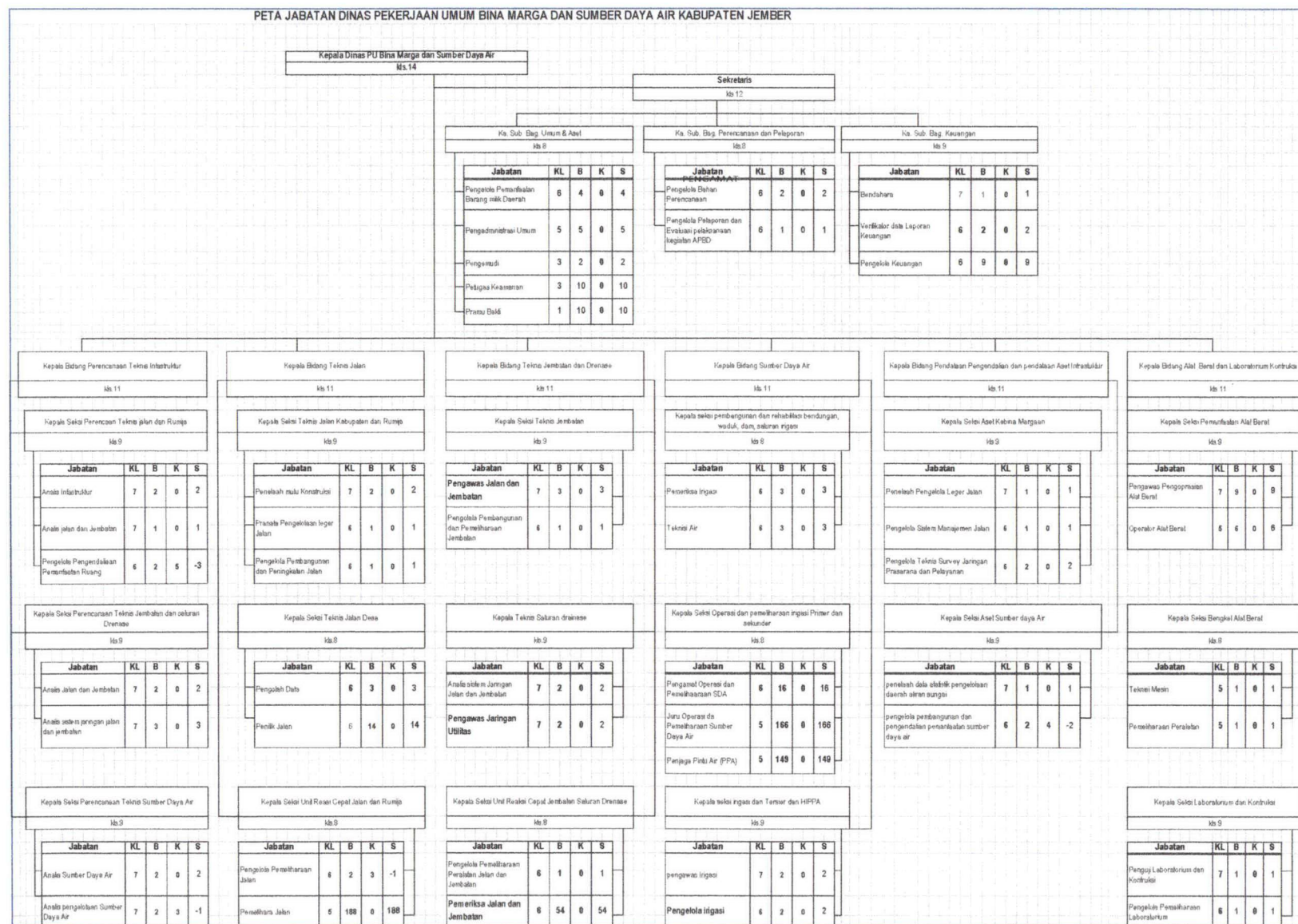
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
- c. Bidang Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan membawahi :
 1. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan; dan
 2. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jembatan.
- d. Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan membawahi :
 1. Seksi Pemeliharaan Jalan; dan
 2. Seksi Pemeliharaan Jembatan.
- e. Bidang Pembangunan dan Rehabilitasi Sumber Daya Air membawahi :
 1. Seksi Pembangunan Sumber Daya Air; dan
 2. Seksi Rehabilitasi Sumber Daya Air.
- f. Bidang Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air membawahi:
 1. Seksi Operasi Jaringan Irigasi;
 2. Seksi Pemeliharaan Sumber Daya Air; dan
 3. Seksi Bina Manfaat Sumber Daya Air.
- g. Bidang Bina Program Pekerjaan Umum membawahi:
 1. Seksi Perencanaan Teknis Pekerjaan Umum;
 2. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase dan Trotoar; dan
 3. Seksi Pemanfaatan Ruang Milik Jalan (RUMIJA) dan Sempadan Sungai.



- h. Bidang Peralatan dan Perbekalan Pekerjaan Umum membawahi:
 - 1. Seksi Peralatan Bina Marga dan Sumber Daya Air; dan
 - 2. Seksi Perbekalan Bina Marga dan Sumber Daya Air.
 - i. UPT; dan
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.



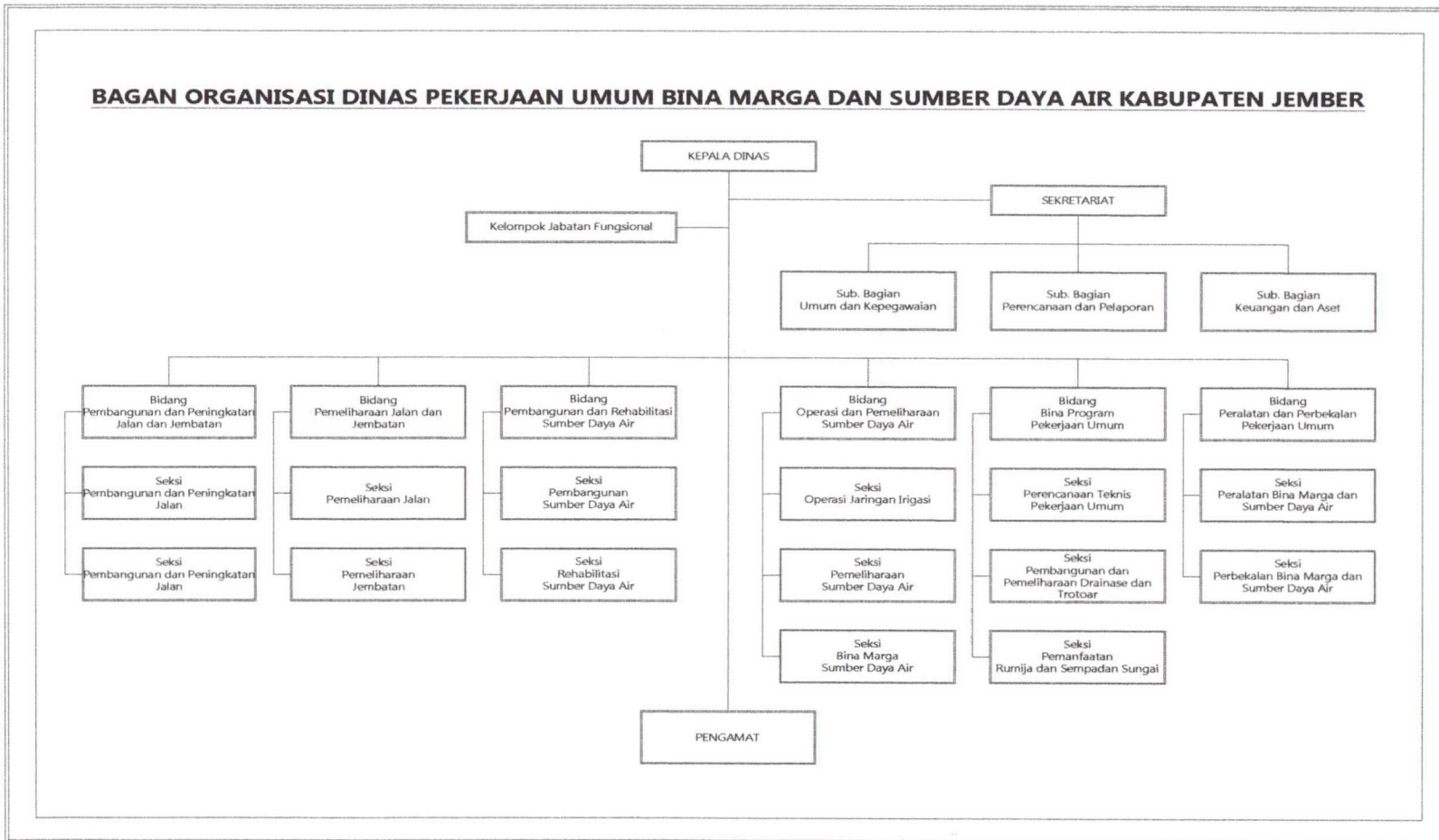
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR



Gambar 1.1 : Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember periode 2020 bulan Januari – Oktober



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER



Gambar 1.1 : Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember periode 2020 bulan November - Desember

1.3 Permasalahan Utama / Isu Strategis

Mendasari pada hasil analisis kinerja pelayanan OPD pada bab sebelumnya dan tugas pokok dan fungsi Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air, yang sesuai dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 37 Tahun 2016, maka berdasarkan beberapa aspek kajian dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi kelemahan dan ancaman bagi Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air dalam upaya pencapaian target kinerja pelayanannya pada masa yang mendatang. Beberapa permasalahan dimaksud berdasarkan beberapa aspek kajian dapat dilihat secara rinci pada tabel 10.

Aspek Kajian	Capaian / Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan
			Internal	Eksternal	
Gambaran Pelayanan OPD	Persentase jalan mantab 83,64%	SPM	Manajemen pemeliharaan jalan yang belum tepat sasaran	Tonnase kendaraan berat melebihi daya dukung jalan Genangan air hujan yang berada cukup lama di badan jalan	Kondisi jalan mantab masih di bawah capaian Kementerian maupun Provinsi.
	Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari 15%	SPM	Keterbatasan database Sumber Daya Air	Kurangnya peranan HIPPA dan GHIPPA dalam kontribusinya pada penyediaan air baku	Penyediaan air baku masih jauh di bawah capaian Kementerian.
Analisis Renstra Kementerian PU dan PR	Persentase panjang jalan yang dilalui roda 78 %	IKK	Kebijakan pembangunan 2010 – 2015 masih bertumpu pada pemeliharaan dan peningkatan daya dukung ruas jalan yang ada	Banyaknya kawasan yang nilai indeks pembangunannya masih cukup rendah karena aksesibilitas yang buruk	Kawasan dengan aksesibilitas rendah dan mobilitas penduduk yang rendah akibat jalan penghubung tidak dapat diakses roda 4
Analisis Renstra DPU Bina Marga & Penataan Ruang Prov. Jawa Timur	Persentase luas lahan yang telah dibebaskan untuk kepentingan pembangunan JLS	Target Renstra OPD Provinsi	Dukungan anggaran yang cukup untuk penyelesaian pembebasan JLS	Terhambatnya pembebasan lahan untuk trase yang melalui tanah perhutani dan Meru Betiri	Lambatnya proses pembebasan lahan JLS

Aspek Kajian	Capaian / Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan
			Internal	Eksternal	
	Persentase jalan kabupaten yang berkeselamatan 71,33%	Instruksi Presiden Tahun 2010	Kebijakan pembangunan yang belum mengacu pada jalan berkeselamatan	Tingginya angka kecelakaan lalu lintas, yang salah satu faktor penyebabnya adalah faktor jalan	Masih rendahnya jalan kabupaten yang berkeselamatan
Analisa RTRW Kabupaten Jember	Status Ruas Ajung – Wirolegi yang masih berstatus Jalan Kabupaten padahal sudah berfungsi sebagai kolektor utama pergerakan antar kabupaten antar provinsi	Permen PU No. 3 Tahun 2012	Kemampuan anggaran daerah untuk meningkatkan daya dukung jalan sesuai fungsinya masih rendah	Koordinasi dengan kementerian dan provinsi terkait pengalihstasusan masih cukup sulit terkait persyaratan yang harus dipenuhi	Pengalihstasusan ruas jalan Ajung – Wirolegi sebagai Jalan Provinsi atau Nasional
	Pengembangan Jalur Lingkar Selatan dan Utara Kota Jember	Perbup No. 16 Tahun 2010	Kemampuan anggaran daerah untuk meningkatkan daya dukung jalan sesuai fungsinya masih rendah	Kinerja jalan dalam kota Jember yang rendah akibat pergerakan menerus dari transportasi barang	Rendahnya kinerja pelayanan jalan di dalam kota sehingga perlunya pengembangan jalur alternatif
Analisa KLHS Kabupaten Jember	Kondisi jalan baik di Kabupaten Jember 71,33%	Daftar Inventarisai Jaringan Jalan Kabupaten (K1)	Kemampuan anggaran daerah untuk meningkatkan daya dukung jalan sesuai fungsinya masih rendah	Pesatnya pertumbuhan kendaraan bermotor. Belum adanya kemitraan antara sektor pemerintah – swasta – masyarakat	Timpangnya pertumbuhan kendaraan bermotor dengan pertumbuhan jaringan jalan
	Meningkatnya lahan kritis pada DAS	Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai	Masih cukup rendahnya alokasi anggaran untuk pemeliharaan DAS.	Peran masyarakat yang masih cukup rendah dalam rangka pengelolaan DAS.	Belum efektifnya kinerja pengelolaan sumber daya air baik dalam bidang perencanaan, distribusi, pemeliharaan, dan kontrol
	Belum optimalnya pengurangan genangan banjir di kota	IKU	Belum adanya masterplan drainase perkotaan untuk Kota Jember	Kepedulian masyarakat dalam ikut serta menciptakan drainase yang lancar dan bersih masih rendah	Lemahnya kinerja saluran drainase perkotaan dalam mengurangi genangan banjir.

Tabel 1.1 : Tabel Isu Strategis

Menindaklanjuti hasil identifikasi permasalahan pada tabel 10 di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember sebagai berikut :

1. Pencapaian target jalan dengan kondisi baik dan sedang sebesar 60% yang tidak terwujud, sebagai akibat dari beberapa penyebab antara lain:
 - a. Tonnase kendaraan berat yang melalui jalan-jalan kabupaten melebihi berat muatan sumbu terberat (MST) yang dipersyaratkan.
 - b. Sistem drainase jalan yang kurang optimal untuk mengakomodasi run off dari air hujan, yang menyebabkan air menggenangi jalan lebih lama dan mengakibatkan kerusakan jalan semakin cepat terjadi.
 - c. Manajemen pemeliharaan jalan kabupaten yang kurang tepat sasaran dan metode konstruksi yang berpengaruh pada kualitas pemeliharaan sistem jaringan jalan kabupaten.
2. Terdapatnya beberapa ruas jalan yang tidak dapat dilalui roda empat dikarenakan jenis perkerasan yang masih berupa tanah atau kerikil dengan lebar jalur yang tidak memungkinkan untuk dilalui roda empat. Hal ini berimbas pada aksesibilitas wilayah yang buruk dan mobilitas penduduk yang rendah, sehingga mengakibatkan perputaran perekonomian wilayah akan terganggu dan kesejahteraan masyarakat akan sulit terpenuhi. Kondisi ini terjadi dikarenakan kebijakan penyelenggaraan jalan kabupaten pada tahun 2010 – 2015 lebih pada peningkatan, pemeliharaan, dan rekonstruksi jalan yang menjadi poros antar kecamatan, poros antar desa, dan jalan strategis kabupaten, sehingga terdapat beberapa ruas jalan yang dapat ditingkatkan hingga dapat dilalui kendaraan roda empat tidak terakomodasi.
3. Minimnya bangunan fasilitas pelengkap jalan seperti trotoar dan saluran drainase jalan sebagai bagian tidak terpisahkan dari sistem jaringan jalan. Hal ini berimplikasi kepada umur layan jalan akibat

tergenangnya air hujan yang tidak terakomodasi oleh saluran drainase, dan rendahnya tingkat keselamatan bagi pengguna jalan, khususnya pejalan kaki, saat melintas ruas jalan yang tidak bertrottoar.

4. Masih banyaknya ruang milik jalan di Kabupaten Jember yang digunakan atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan peran dan fungsi jalan, dalam hal ini masih maraknya pedagang kaki lima dan bangunan liar. Tidak terdapatnya sistem informasi atau database terkait pemanfaatan ruang milik jalan dan belum adanya peraturan daerah yang mengatur tentang pemanfaatan ruang milik jalan sehingga penegakan hukum tidak dapat dilakukan secara optimal merupakan penyebab kondisi ini terjadi.
5. Pemenuhan kebutuhan sistem jaringan jalan Kabupaten Jember, khususnya di Kota Jember, masih cukup tinggi. Tingginya pertumbuhan kendaraan bermotor di Kabupaten Jember, sedangkan total panjang sistem jaringan jalan kabupaten yang tidak bertambah menjadi penyebab mengapa kebutuhan sistem jaringan jalan Kabupaten Jember masih cukup tinggi.
6. Rendahnya penyediaan air baku guna pendukung kegiatan pertanian di Kabupaten Jember masih cukup rendah. Hal ini dikarenakan masih kurang efektifnya infrastruktur jaringan irigasi dalam penyediaan air baku. Kondisi ini dapat dilihat dari kondisi jaringan irigasi yang butuh pemeliharaan dan rehabilitasi masih cukup besar.
7. Rendahnya peran HIPPA dan GHIPPA dalam mendukung program pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk pelestarian lingkungan di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang berimbas pada semakin tingginya lahan subur di kawasan DAS menjadi lahan kritis.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategik

Perencanaan Strategik menurut Inpres No. 7 Tahun 1999, menyebutkan perencanaan strategik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Rencana Strategik mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijaksanaan dan program yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Berdasarkan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Jember, adalah :

**” Jember Bersatu (Bersinergi) Menuju Masyarakat Makmur,
Sejahtera, Berkeadilan, dan Mandiri ”**

Visi diatas mempunyai dasar argumentasi yang sangat dalam untuk menjawab tuntutan dan tantangan yang akan dihadapi Daerah Kabupaten Jember pada saat ini dan untuk menghadapi tantangan kedepan.

Berdasarkan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Jember, di jabar menjadi 3 (tiga) misi, yaitu :

1. Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik.
2. Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat yang Berkeadilan.
3. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang Mandiri dan Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis/Agro-industri dan Industrialisasi Secara Berkelanjutan.

Menelaah ketiga misi kepala daerah dihubungkan dengan pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember, maka keterkaitan erat ada pada misi ketiga. Keterkaitan dimaksud adalah penyediaan infrastruktur dalam rangka

usaha pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis agrobisnis dan industrialisasi secara berkelanjutan, penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, dan jaringan irigasi serta bangunan pelengkap lainnya yang handal dan mantab akan meningkatkan kelancaran distribusi barang dan jasa dan secara tidak langsung akan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Untuk dapat melaksanakan misi 3 dari visi pembangunan Kabupaten Jember 2016–2021, melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2016 -2021, Pemerintah Kabupaten Jember telah menetapkan tujuan yang harus dicapai. Terkait dengan tugas pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air, tujuan yang harus dicapai yaitu meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mengembangkan daya saing ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Dalam rangka menjalankan misinya Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember menetapkan Tujuan dan Sasaran sebagai berikut:

Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas dan kinerja lembaga dalam rangka penguatan fungsi kelembagaan untuk penyelenggaraan bidang kebinamargaan dan sumber daya air kabupaten yang berkelanjutan.

Sasaran 1 : Terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran dalam mendukung tugas-tugas yang dibebankan.

Sasaran 2 : Terpenuhinya kebutuhan akan Sumber Daya Aparatur yang berkualitas dan berkompeten sesuai dengan tugas pokoknya.

Sasaran 3 : Terpenuhinya kinerja kelembagaan yang profesional dan akuntabel melalui kebutuhan akan dokumen yang memproyeksikan kinerja kelembagaan.

Tujuan 2 : Meningkatkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan dan sumber daya air.

Sasaran 1 : Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pengendalian dan pemanfaatan Ruang Milik Jalan dan Sempadan Sungai

Tujuan 3 : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mengembangkan daya saing ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran 1 : Meningkatnya kinerja pelayanan dan pembangunan prasarana transportasi jaringan jalan melalui terwujudnya jalan dalam kondisi mantab, berkeselamatan, dan mendukung aksesibilitas wilayah.

Sasaran 2 : Meningkatnya pengelolaan sumber daya air melalui konservasi dan pendayagunaan sumber daya air.

2.2 Rencana Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember melalui berbagai kegiatan di tahun 2020.

Dokumen rencana kinerja ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2020, indikator kinerja sasaran, dan target sasarannya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas dan kinerja lembaga dalam rangka penguatan fungsi kelembagaan untuk penyelenggaraan bidang kebinamargaan dan sumber daya air kabupaten yang berkelanjutan.

Sasaran 1 : Terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran dalam mendukung tugas-tugas yang dibebankan.

Indikator Sasaran 1 :Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran, sarpras perkantoran, & disiplin aparatur.

Sasaran 2 : Terpenuhinya kebutuhan akan Sumber Daya Aparatur yang berkualitas dan berkompeten sesuai dengan tugas pokoknya.

Indikator Sasaran 1 :Persentase pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Aparatur yang berkualitas dan berkompeten.

Sasaran 3 : Terpenuhinya kinerja kelembagaan yang profesional dan akuntabel melalui kebutuhan akan dokumen yang memproyeksikan kinerja kelembagaan.

Indikator Sasaran 1:Persentase capaian kinerja secara kelembagaan.

Indikator Sasaran 2 :Persentase tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana kebinamargaan dan keairan yang siap dan layak pakai.

Tujuan 2 : Meningkatkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan dan sumber daya air.

Sasaran 1 : Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pengendalian dan pemanfaatan Ruang Milik Jalan dan Sempadan Sungai.

Indikator Sasaran 1 : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Tujuan 3 : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mengembangkan daya saing ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran 1 : Meningkatnya kinerja pelayanan dan pembangunan prasarana transportasi jaringan jalan melalui terwujudnya jalan dalam kondisi mantab, berkeselamatan, dan mendukung aksesibilitas wilayah.

Indikator Sasaran 1 : Panjang Jalan Baru yang Terbangun

Indikator Sasaran 2 : Jumlah Jembatan Baru yang Terbangun

Indikator Sasaran 3 : Persentase panjang jalan dalam kondisi baik

Indikator Sasaran 4 : Persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik

Indikator Sasaran 5 : Panjang drainase dalam kondisi baik

Sasaran 2 : Meningkatnya pengelolaan sumber daya air melalui konservasi dan pendayagunaan sumber daya air.

Indikator Sasaran 1 : Luas area beririgasi

Indikator Sasaran 2 : Jumlah Kelompok HIPPA Mandiri

2.3 Penetapan Kinerja

Penetapan kinerja berisikan janji kepala SKPD untuk mewujudkan target kinerja tahunan dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah (5 tahunan) seperti yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan (Rencana Strategis) SKPD.

Dalam implementasi Sistem AKIP di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Pemerintah Kabupaten Jember, kami berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan.

Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, dan penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran.

Pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja tersebut diberikan dengan memberikan atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria yaitu:

No	Nilai Capaian Kinerja		Pemberian Atribut
	%	Keterangan Presentase	
1.	85% s.d 100%	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen atau lebih	Sangat Berhasil
2.	70% s.d <85%	Tujuh puluh persen sampai kurang dari delapan puluh lima persen	Berhasil
3.	55% s.d <70%	Lima puluh lima persen sampai kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4.	X<55%	Di bawah lima puluh lima persen	Tidak Berhasil

Tabel 2.1 : Penilai LAKIP

Dalam penetapan kinerja tertuang perjanjian antara Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga sebagai pihak pertama dengan Bupati Jember sebagai pihak kedua selaku atasan langsung pihak pertama tentang Penetapan Kinerja (TAPKIN) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Tahun 2020. Penetapan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Tahun 2020 berisikan sasaran- sasaran strategis dinas, indikator kinerja sasaran, target kinerja sasaran, dan program-program utama yang dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran serta anggaran yang disediakan. Penetapan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Tahun 2020 tercantum sebagaimana Tabel pada lampiran.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah merupakan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan kepada pemberi mandat (wewenang) atas pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam suatu media pelaporan (LAKIP).

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis berikut indikator kinerjanya, namun demikian terdapat pula beberapa sasaran strategis yang belum sepenuhnya berhasil diwujudkan pada tahun 2020. Dalam upaya pengembangan sistem akuntabilitas kinerja instansi, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air telah melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan yang baik dan akuntabel.

3.1.1 Membandingkan Antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Pada bagian ini menjelaskan perbandingan target kinerja yang direncanakan dengan realisasi yang telah dicapai pada tahun 2020.

Misi 3, Tujuan 1, Sasaran 1 :

Terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran dalam mendukung tugas-tugas yang dibebankan.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	72,55%	72,55%
Persentase pemenuhan sarpras perkantoran	100%	38,46%	38,46%
Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	0,00%	0,00%

Misi 3, Tujuan 1, Sasaran 2 :

Terpenuhinya kebutuhan akan Sumber Daya Aparatur yang berkualitas dan berkompeten sesuai dengan tugas pokoknya.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Aparatur yang berkualitas dan berkompeten.	100%	55,39%	55,39%

Misi 3, Tujuan 1, Sasaran 3 :

Terpenuhinya kinerja kelembagaan yang profesional dan akuntabel melalui kebutuhan akan dokumen yang memproyeksikan kinerja kelembagaan.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase capaian kinerja secara kelembagaan.	100%	0 %	0 %
Persentase tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana kebinamargaan dan keairan yang siap dan layak pakai.	100 %	5,80%	5,80%

Misi 3, Tujuan 2, Sasaran 1 :

Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pengendalian dan pemanfaatan Ruang Milik Jalan dan Sempadan Sungai.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).	100%	94,66%	94,66%

Misi 3, Tujuan 3, Sasaran 1 :

Meningkatnya kinerja pelayanan dan pembangunan prasarana transportasi jaringan jalan melalui terwujudnya jalan dalam kondisi mantab, berkeselamatan, dan mendukung aksesibilitas wilayah.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Panjang Jalan Baru yang Terbangun	100%	0,00 %	0,00%
Jumlah Jembatan Baru yang Terbangun	100%	0,00 %	0,00%
Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	100%	83,64%	83,64%
Persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik	100%	54,15 %	54,15 %
Panjang drainase dalam kondisi baik	100%	79.60 %	79.60 %

Misi 3, Tujuan 3, Sasaran 2 :

Meningkatnya pengelolaan sumber daya air melalui konservasi dan pendayagunaan sumber daya air.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Luas area beririgasi	100%	99,99%	99,99%
Jumlah Kelompok HIPPA Mandiri	100%	90%	90%

3.1.2 Membandingkan realisasi kinerja tahun 2020 dengan tahun sebelumnya

Pada bagian ini membandingkan realisasi kinerja tahun 2020 dengan tahun sebelumnya, anggaran pada tahun sebelumnya Rp. 303.760.805.656,95 dan Realisasinya Rp. 229.016.556.061,10 anggaran pada tahun 2020 Rp.153.205.816.875,40 dan Realisasi Rp. 63.053.611.210,26

3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai tahun 2020 dengan target jangka menengah pada dokumen RENSTRA

Pada bagian ini menjelaskan realisasi kinerja yang direncanakan sampai tahun 2020 dengan target jangka menengah pada dokumen RENSTRA.

Misi 3, Tujuan 1, Sasaran 1 :

Terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran dalam mendukung tugas-tugas yang dibebankan.

INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET RENSTRA	CAPAIAN
Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	72,55%	100%	72,55%
Persentase pemenuhan sarpras perkantoran	55,51%	100%	55,51%
Persentase pemenuhan disiplin aparatur	38,46 %	100%	38,46%

Misi 3, Tujuan 1, Sasaran 2 :

Terpenuhinya kebutuhan akan Sumber Daya Aparatur yang berkualitas dan berkompeten sesuai dengan tugas pokoknya.

INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET RENSTRA	CAPAIAN
Persentase pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Aparatur yang berkualitas dan berkompeten.	55,39%	100%	55,39%

Misi 3, Tujuan 1, Sasaran 3 :

Terpenuhinya kinerja kelembagaan yang profesional dan akuntabel melalui kebutuhan akan dokumen yang memproyeksikan kinerja kelembagaan.

INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET RENSTRA	CAPAIAN
Persentase capaian kinerja secara kelembagaan.	0 %	100%	0 %
Persentase tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana kebinamargaan dan keairan yang siap dan layak pakai.	5,80 %	100 %	5,80%

Misi 3, Tujuan 2, Sasaran 1 :

Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pengendalian dan pemanfaatan Ruang Milik Jalan dan Sempadan Sungai.

INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET RENSTRA	CAPAIAN
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).	0,74	1,00	74%

Misi 3, Tujuan 3, Sasaran 1 :

Meningkatnya kinerja pelayanan dan pembangunan prasarana transportasi jaringan jalan melalui terwujudnya jalan dalam kondisi mantab, berkeselamatan, dan mendukung aksesibilitas wilayah.

INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET RENSTRA	CAPAIAN
Panjang Jalan Baru yang Terbangun	0 Km	208 Km	0%
Jumlah Jembatan Baru yang Terbangun	0 Unit	11 Unit	0%
Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	83,64%	80 %	104,55%
Persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik	54,15 %	80 %	67,69%
Panjang drainase dalam kondisi baik	139.192 m	135.459 m	102,76%

Misi 3, Tujuan 3, Sasaran 2 :

Meningkatnya pengelolaan sumber daya air melalui konservasi dan pendayagunaan sumber daya air.

INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET RENSTRA	CAPAIAN
Luas area beririgasi	86.598 Ha	86.571 Ha	100%
Jumlah Kelompok HIPPA Mandiri	18 Kelompok	18 Kelompok	100%

3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun 2020 dengan standar nasional

Pada bagian ini menjelaskan realisasi kinerja tahun 2020 yang direncanakan dengan standar nasional yang diterbitkan oleh pemerintah pusat atau kementerian terkait.

Misi 3, Tujuan 1, Sasaran 1 :

Terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran dalam mendukung tugas-tugas yang dibebankan

INDIKATOR KINERJA	REALISASI	STANDAR NASIONAL	CAPAIAN
Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	72,55%	-	72,55%
Persentase pemenuhan sarpras perkantoran	55,51%	-	55,51%
Persentase pemenuhan disiplin aparatur	38,46%	-	38,46%

Misi 3, Tujuan 1, Sasaran 2 :

Terpenuhinya kebutuhan akan Sumber Daya Aparatur yang berkualitas dan berkompeten sesuai dengan tugas pokoknya.

INDIKATOR KINERJA	REALISASI	STANDAR NASIONAL	CAPAIAN
Persentase pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Aparatur yang berkualitas dan berkompeten.	51,17%	-	51,17%

Misi 3, Tujuan 1, Sasaran 3 :

Terpenuhinya kinerja kelembagaan yang profesional dan akuntabel melalui kebutuhan akan dokumen yang memproyeksikan kinerja kelembagaan.

INDIKATOR KINERJA	REALISASI	STANDAR NASIONAL	CAPAIAN
Persentase capaian kinerja secara kelembagaan.	0 %	-	0 %
Persentase tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana kebinamargaan dan keairan yang siap dan layak pakai.	5,80%	-	5,80%

Misi 3, Tujuan 2, Sasaran 1 :

Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pengendalian dan pemanfaatan Ruang Milik Jalan dan Sempadan Sungai.

INDIKATOR KINERJA	REALISASI	STANDAR NASIONAL	CAPAIAN
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).	0,74	-	74%

Misi 3, Tujuan 3, Sasaran 1 :

Meningkatnya kinerja pelayanan dan pembangunan prasarana transportasi jaringan jalan melalui terwujudnya jalan dalam kondisi mantab, berkeselamatan, dan mendukung aksesibilitas wilayah.

INDIKATOR KINERJA	REALISASI	STANDAR NASIONAL	CAPAIAN
Panjang Jalan Baru yang Terbangun	0%	100%	0%
Jumlah Jembatan Baru yang Terbangun	0%	100%	0%
Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	83,64%	60%	139,40%
Persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik	54,15%	60%	90,25%
Panjang drainase dalam kondisi baik	79,60%	60%	132,66%

Misi 3, Tujuan 3, Sasaran 2 :

Meningkatnya pengelolaan sumber daya air melalui konservasi dan pendayagunaan sumber daya air.

INDIKATOR KINERJA	REALISASI	STANDAR NASIONAL	CAPAIAN
Luas area beririgasi	97%	70%	138,57%
Jumlah Kelompok HIPPA Mandiri	90%	-	90%

3.1.5 Analisa penyebab keberhasilan / kegagalan, peningkatan / penurunan kinerja, dan alternatif solusi yang dilakukan

Dalam melaksanakan kegiatan ada beberapa kendala, antara lain :

1. Dalam pekerjaan konstruksi dalam pelaksanaannya terdapat kendala yang menyebabkan pelaksanaannya menjadi lama. Kendala tersebut antara lain :

- a. Kondisi lapangan yang tidak sesuai dengan perencanaan
- b. Kondisi cuaca yang berubah

Permasalahan tersebut diatasi dengan cara :

- a. Merubah desain terhadap konstruksi yang akan dibangun menyesuaikan kondisi yang ada.
- b. Menambah masa pelaksanaan pekerjaan dengan merubah kontrak atau SPK.

3.2 Realisasi Anggaran

Secara rinci, akuntabilitas keuangan berdasarkan kegiatan yang dilakukan pada Dinas PU Bina Marga Kabupaten Jember dapat dilihat pada tabel berikut.

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SELISIH (Rp)	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	311.025.000,00	259.276.799,00	51.748.201,00	83,36
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	101.510.000,00	48.779.525,00	52.730.475,00	48,05
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	200.000.000,00	195.099.135,00	4.900.865,00	97,55
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	125.000.000,00	66.866.623,00	58.133.377,00	53,49
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000,00	5.955.580,00	44.044.420,00	11,91
13	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Kantor	176.875.000,00	20.025.000,00	156.850.000,00	11,32
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	50,00
17	Penyediaan Makanan dan Minuman	505.000.000,00	182.573.630,00	322.426.370,00	36,15
18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	200.000.000,00	124.056.189,00	75.943.811,00	62,03
19	Penyediaan Tenaga Pendukung Kelancaran Operasional Kantor	2.654.200.000,00	2.609.124.000,00	45.076.000,00	98,30

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SELISIH (Rp)	%
20	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi Dalam Daerah	50.000.000,00	14.660.000,00	35.340.000,00	29,32
22	Penyediaan Peralatan dan Bahan Kebersihan	115.000.000,00	12.741.815,00	102.258.185,00	11,08
27	Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan	1.523.940.000,00	824.472.000,00	699.468.000,00	54,10
2	<u>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</u>				
22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung	200.000.000,00	137.219.910,00	62.780.090,00	68,61
23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	32.000.000,00	8.353.492,00	23.646.508,00	26,10
24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	849.600.000,00	234.269.381,00	615.330.619,00	27,57
31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman	75.000.000,00	64.973.195,00	10.026.805,00	86,63
6	<u>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</u>				
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (Lakip) dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.350.000,00	0,00	11.350.000,00	0,00
9	Penatausahaan dan Pelaporan Administrasi Barang Daerah di SKPD	14.800.000,00	0,00	14.800.000,00	0,00
10	Implementasi Sistem Penatausahaan Pendapatan Daerah di SKPD	44.750.000,00	0,00	44.750.000,00	0,00
15	<u>Program Pembangunan Jalan dan Jembatan</u>				
7	Pengadaan Tanah utk. Pelebaran Jalan Kab	267.400.000,00	0,00	267.400.000,00	0,00
9	Peningkatan Jalan	21.051.547.000,00	3.543.179.551,04	17.508.367.448,96	16,83
10	Pembangunan/Peningkatan Jembatan	9.976.500.000,00	9.980.000,00	9.966.520.000,00	0,10

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SELISIH (Rp)	%
16	<u>Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong</u>				
3	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	8.676.720.000,00	591.716.901,60	8.085.003.098,40	6,82
6	Pembangunan/Pemeliharaan Drainase	698.100.000,00	499.915.946,00	198.184.054,00	71,61
18	<u>Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan</u>				
3	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	43.737.024.000,00	13.995.318.580,00	29.741.705.420,00	32,00
4	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	4.788.039.000,00	91.023.397,50	4.697.015.602,50	1,90
20	<u>Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan</u>				
2	Inspeksi Kondisi Jembatan	647.582.000,00	40.340.000,00	607.242.000,00	6,23
23	<u>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Pengadaan</u>				
6	Alat - alat Ukur dan Bahan	93.000.000,00	230.000,00	92.770.000,00	0,25
10	Laboratorium Kebinamargaan	920.000.000,00	63.523.798,00	856.476.202,00	6,90
12	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat - Alat Berat				
12	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat - Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan	87.000.000,00	0,00	87.000.000,00	0,00
24	<u>Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya</u>				
19	Manajemen Sumber Daya Air dan Irigasi	467.460.000,00	98.803.935,00	368.656.065,00	21,14
53	<u>Program Pembangunan dan Rehabilitasi Sumber Daya Air</u>				
3	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	5.180.824.605,00	3.110.488.873,12	2.070.335.731,88	60,04

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SELISIH (Rp)	%
54	<u>Program Operasi Jaringan Irigasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air</u>				
3	Penyediaan dan Pembagian Air Irigasi, serta Penetapan Tata Kerja dan Tata Tanam	2.559.900.000,00	700.000.954,00	1.859.899.046,00	27,34
4	Pengendalian Operasi Jaringan Irigasi	470.700.000,00	268.153.726,00	202.546.274,00	56,97
5	Pemeliharaan Jaringan Irigasi, Drainase, dan Bangunan Pelengkap Pengendalian dan	1.437.781.420,00	273.573.300,00	1.164.208.120,00	19,03
6	Penanggulangan Banjir Pembangunan dan Perbaikan	5.243.424.680,00	1.261.147.227,00	3.982.277.453,00	24,05
8	Pemberdayaan Petani Pemakai Air	340.500.000,00	0,00	340.500.000,00	0,00
	JUMLAH	113.889.552.705,00	29.358.842.463,26	84.530.710.241,74	25,78

*Tabel 3.1 : Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber
Daya Air Tahun 2020*

BAB IV PENUTUP

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember secara Keseluruhan tidak dapat terselenggara secara maksimal karena adanya refocusing anggaran untuk kegiatan Covid-19 . Diharapkan untuk masa mendatang kinerja dapat lebih ditingkatkan, tidak hanya dalam pencapaian target kuantitas kegiatan, tetapi juga dalam kualitas pelaksanaan pekerjaan dan selain daripada itu untuk mewujudkan aparatur negara yang profesional serta memahami tugas pokok dan fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal agar penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, stabil, dan dinamis.

Untuk pelaksana kegiatan pada tahun 2020 bulan Nopember sampai Desember ada perubahan SOTK 2016 ,karena adanya Rekomendasi menteri dalam Negeri No.700/12429/Sj Tgl 11 November 2019 yang menyebutkan untuk mengembalikan jabatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jember pada posisi sebelum tgl 3 Januari 2018

Demikian laporan akuntabilitas instansi pemerintah (LAKIP) ini dibuat, kiranya bermanfaat dan dapat dijadikan evaluasi untuk masa mendatang.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

- Lampiran 1. Rencana Strategis (RS)**
- Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahun 2020 (RKT 2020)**
- Lampiran 3. Penetapan Kinerja Tahun 2020**
- Lampiran 4. Pengukuran Kinerja Tahun 2020**

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020

NO.	TUJUAN	SASARAN		CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KET.
		URAIAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	PROGRAM	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Peningkatan kualitas dan kinerja lembaga	Sarana dan prasarana perkantoran dalam dalam kondisi baik	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran, sarpras perkantoran, & disiplin aparatur	Melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran, pemeliharaan sarpras perkantoran dan peningkatan SDM aparatur	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Program Peningkatan Disiplin Aparatur 	
		Aparatur yang berkualitas dan berkompeten sesuai dengan tugas pokoknya	Persentase pemenuhan kebutuhan SD Aparatur yang berkualitas dan berkompeten	Melaksanakan pemenuhan kebutuhan sumber daya aparatur	Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah	
		Kinerja kelembagaan yang profesional dan akuntabel	Persentase capaian kinerja secara kelembagaan	Melaksanakan peningkatan sumber daya aparatur	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
			Persentase tersedianya kebutuhan sarana	Melakukan pemeliharaan peremajaan sarpras	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	

NO.	TUJUAN	SASARAN		CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KET.
		URAIAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	PROGRAM	
1	2	3	4	5	6	7
			dan prasarana kebinamargaan dan keairan yang siap dan layak pakai.	kebinamargaan dan keairan		
2.	Peningkatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan dan sumber daya air	Pengendalian dan pemanfaatan Ruang Milik Jalan dan Sempadan Sungai	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Melaksanakan pemanfaat dan pengendalian ruang milik jalan dan sempadan	Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan	
3.	Indeks kualitas layanan infrastruktur	Kondisi jalan baik (mantap)	Meningkatkan jalan dalam kondisi baik	Melakukan pembangunan dan rehabilitasi pemeliharaan jalan secara kontinyu	<ul style="list-style-type: none"> - Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan - Program Pembangunan Jalan dan Jembatan - Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 	
			Meningkatkan jembatan dalam kondisi baik	Melakukan pembangunan dan rehabilitasi pemeliharaan jembatan secara kontinyu	<ul style="list-style-type: none"> - Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan - Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 	

NO.	TUJUAN	SASARAN		CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KET.
		URAIAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	PROGRAM	
1	2	3	4	5	6	7
		Kinerja jaringan irigasi dalam kondisi baik	Persentase Kinerja jaringan irigasi dalam kondisi baik	Melakukan rehaibitasi, pemeliharaan daerah irigasi	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pembangunan dan Rehabilitasi Sumber Daya Air - Program Operasi Jaringan Irigasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air 	
		Kinerja jaringan irigasi dalam kondisi baik	Luas area beririgasi	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan Desain dan Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi Partisipatif. - Optimalisasi Sistem Pola Tata Tanam, Komoditi dan Budidaya. - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Bangunan Irigasi - Menormalisasi Saluran dengan Menggali / Mengeruk Sedimen. 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya - Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku - Program Pengendalian Banjir 	
				Jumlah Kelompok HIPPA Mandiri	Melaksanakan Sosialisasi dan Menggalakkan Program Kali Bersih dan	Program Pengembangan dan

NO.	TUJUAN	SASARAN		CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KET.
		URAIAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	PROGRAM	
1	2	3	4	5	6	7
					pemberdayaan serta peningkatan pengetahuan HIPPA .	Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Jember, 25 Februari 2021

Pt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA
MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN JEMBER



Ir. H. IMAM SUDARMAJI, M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19690913 199501 1 002

LAMPIRAN 2

RENCANA KERJA TAHUN 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran, sarpras perkantoran, & disiplin aparatur	100%
2.	Kinerja kelembagaan yang profesional dan akuntabel	Persentase capaian kinerja secara kelembagaan	100%
		Persentase tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana kebinamargaan dan keairan yang siap dan layak pakai.	100%
3.	Kondisi jalan baik (mantap)	Persentase jalan kondisi baik (mantap)	80 %
4.	Kinerja jaringan irigasi dalam kondisi baik	Persentase Kinerja Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	83 %

Jember, 25 Februari 2021

Pit. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA
MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN JEMBER



Ir.H. IMAM SUDARMAJI, M.Si

Pembina Tk.I
NIP. 19690913 199501 1 002

LAMPIRAN 3

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2020

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1.	Sarana dan prasarana perkantoran dalam dalam kondisi baik	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran, sarpras perkantoran, & disiplin aparatur	100%	- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	6.018.550.000,00 1.156.600.000,00
2.	Kinerja kelembagaan yang profesional dan akuntabel	Persentase capaian kinerja secara kelembagaan	100%	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	70.900.000,00
		Persentase tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana kebinamargaan dan keairan yang siap dan layak pakai.	100%	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	1.100.000.000,00

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
1	2	3	4	5	6
3.	Kondisi jalan baik (mantap)	Persentase Jalan Kondisi baik (mantap)	80 %	<ul style="list-style-type: none"> - Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan - Program Pembangunan Jalan dan Jembatan - Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong - Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan 	<p>48.525.063.000,00</p> <p>31.295.447.000,00</p> <p>9.374.820.000,00</p> <p>647.582.000,00</p>

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
1	2	3	4	5	6
4.	Kinerja jaringan irigasi dalam kondisi baik	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	83%	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya - Program Pembangunan dan Rehabilitasi Sumber Daya Air - Program Operasi Jaringan Irigasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air 	<p>467.460.000,00</p> <p>5.180.824.605,00</p> <p>10.052.306.100,00</p>

Jember, 25 Februari 2021

Pt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA
MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN JEMBER



I.H. IMAM SUDARMAJI, M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19690913 199501 1 002

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2020

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
1.	Sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran, sarpras perkantoran, & disiplin aparatur	100%	4.811.446.274,00	67,06%
2.	Kinerja kelembagaan yang profesional dan akuntabel	Persentase capaian kinerja secara kelembagaan	100%	0,00	0,00%
		Persentase tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana kebinamargaan dan keairan yang siap dan layak pakai.	100%	63.753.798,00	5,80%
3.	Kondisi jalan baik (mantap)	Persentase jalan kondisi baik (mantap)	80 %	18.771.474.376,140	20,89 %
4.	Kinerja jaringan irigasi dalam kondisi baik	Persentase Kinerja Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	83 %	5.712.168.015,00	36,38 %

Jember, 25 Februari 2021

Pt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA
MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN JEMBER



Ir.H. IMAM SUDARMAJI, M.Si

Pembina Tk.I
NIP. 19690913 199501 1 002